PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 08 Januari 2020 Halaman: 9

Tanggal : 8-1-2020 Halaman : 9

DEWAN SIAPKAN PEMBENTUKAN PANSUS

Raperda Dibahas Tiap Triwulan

YOGYA (KR) - Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Yogya menyepakati pembahasan raperda tahun ini dilakukan tiap triwulan. Hal ini supaya kinerja dewan dari fungsi legislasi dapat terukur. Masyarakat juga bisa mendapatkan kepastian terkait produk hukum yang tengah dibahas.

Wakil Ketua Bapemperda DPRD Kota Yogya Emanuel Ardi Prasetyo mengaku pihaknya saat ini tengah menyiapkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengawali pembahasan raperda. "Target kami akhir bulan ini pansus sudah terbentuk. Dua pansus sekaligus karena di triwulan pertama ada dua raperda yang akan dibahas," jelasnya, Selasa (7/1).

Dua raperda yang akan dibahas dalam kurun waktu triwulan pertama ialah terkait Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kedua raperda tersebut merupakan hasil inisiatif walikota atau eksekutif. Naskah akademiknya juga sudah siap sehingga pembahasannya tinggal menunggu pansus terbentuk.

Ardi mengaku, untuk kedua raperda tersebut ditargetkan sudah selesai maksimal akhir Maret. Hal ini karena memasuki triwulan kedua atau April, sudah disepakati akan membahas dua raperda baru yakni terkait sistem online pajak daerah dan ketahanan keluarga. "Harapan kami semua sesuai target.

Kami pun akan mengawal tiap tahapan pembahasan yang dilakukan oleh pansus. Jika ada satu yang molor, bisa berpengaruh pada target di triwulan selanjutnya," imbuhnya.

Pada tahun ini, total ada sembilan raperda yang sudah masuk dalam Program Pembuatan Peraturan Daerah (Propemperda) 2020. Sebelumnya ada sepuluh usulan raperda, namun ada satu yang ditunda yakni terkait pembentukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Dari sembilan raperda itu, usulan legislatif hanya dua raperda yakni terkait ketahanan keluarga dari pengelolaan utilitas perumahan.

Sementara pada triwulan ketiga atau mulai Juli hingga September ada empat raperda yang akan dibahas. Masing-masing terkait perubahan kelembagaan PD Jogjatama Vishesha, pertanggungjawaban APBD 2019, perubahan APBD 2020, dan pengelolaan utilitas perumahan.

Sedangkan triwulan keempat atau terakhir, hanya satu raperda yakni terkait APBD 2021. "Kami sangat optimis semua Propemperda bisa dituntaskan. Nanti saat perubahan APBD 2020 kami juga akan melihat apakah akan ada penambahan Propemperda atau tidak," tandas Ardi. **(Dhi) -o**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota 2. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005